

PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN PASCA PUTUSAN PCA (*PERMANENT COURT OF ARBITRATION*)

*Ruth Megawati Zebua¹, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
Email: ruthmegawatizebua908@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This research examines the United States' support for the Philippines in the South China Sea conflict after the PCA (Permanent Court of Arbitration) verdict with a qualitative approach and descriptive analysis method. In analyzing the dynamics of conflict and international support, researchers use the Balance of Power theory to see the balance of regional power, as well as the theory of the International Law of the Sea (UNCLOS) as a legal basis for maritime territory. The results of this study show that the United States' support for the Philippines after the PCA Decision includes several aspects including military defense, diplomatic support, and statements supporting freedom of navigation and respect for international law of the sea. This support not only aims to uphold the principles of international law of the sea, but also to maintain the balance of power in the South China Sea region to withstand China's dominance.

Keywords: South China Sea, United States, Philippines, Balance of Power, Realism

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang banyak diperebutkan secara langsung oleh Republik Tiongkok dan beberapa negara anggota ASEAN. Laut cina selatan salah satu wilayah yang strategis, karena merupakan jalur ekspor-impor dan salah satu jalur utama perdagangan. Selain itu, laut ini juga merupakan perairan terbesar kedua di dunia. Menurut banyak penelitian bahwa sumber daya alam laut cina selatan yang sangat melimpah, jalur pelayaran yang padat dan sengketa wilayah menjadi tempat perselisihan dan perebutan yang telah menarik banyak perhatian dari berbagai dunia (Hidayat et al., 2024).

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kawasan Asia-Pasifik menjadi salah satu titik fokus dalam percaturan geopolitik global, terutama seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, termasuk Filipina dan Tiongkok. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan klaim teritorial yang tumpang tindih, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya alam yang melimpah dan jalur perdagangan strategis yang penting bagi keamanan global. Dalam konteks ini, peran negara besar, terutama Amerika Serikat, menjadi krusial dalam menjaga stabilitas kawasan. Sebagai sekutu utama Filipina sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat memainkan peran penting mendukung Filipina melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan dan keamanan, terutama dalam menghadapi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat memiliki sejumlah kepentingan strategis di kawasan laut cina selatan yang secara terbuka disampaikan melalui berbagai forum internasional dan media. Pertama, Amerika Serikat menegaskan pentingnya penerapan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS (*United Nations Convention on the law of the Sea*), sebagai landasan normatif dalam menyelesaikan sengketa dikawasan. Kedua, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendorong keamanan stabilitas regional, yang dianggap sebagai persyaratan bagi perdamaian dan kerja sama di kawasan asia pasifik. Ketiga, Amerika Serikat memiliki kepentingan vital dalam menjaga kelancaran jalur perdagangan internasional, termasuk memastikan akses bebas dan terbuka ke perairan laut cina selatan yang merupakan jalur penting bagi pertumbuhan ekonomi global (Yani, 2022).

Filipina sebagai salah satu negara yang memiliki klaim atas wilayah Laut Cina Selatan telah terlibat sengketa dengan Tiongkok di kepulauan *Spratly* dan *Scarborough Shoal*. Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus disekeliling kepulauan milik Filipina pada tahun 1955. Filipina mengklaim beberapa pulau di sekitar kepulauan *Spratly* berdasarkan temuan dari Thomas Cloma, direktur maritim Filipina. Pada tahun 2012, terdapat sebuah kapal nelayan Tiongkok beroperasi di sekitar gugusan karang *Scarborough*, salah satu gugusan karang di kepulauan *Spratly*. Langsung saja, angkatan laut Filipina berusaha menangkap kapal nelayan yang beroperasi tersebut, namun penangkapan digagalkan oleh kapal pengintai Tiongkok yang berada di perairan *Spratly*. Salah satu juru bicara kementerian luar negeri Filipina mengajukan protes diplomatic dengan menuduh kapal Tiongkok mengancam kapal riset Filipina di Kawasan *Scarborough Shoal* (Kompas, 2012).

Hukum Laut Internasional berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana penyelesaian kasus yang bersengketa dapat menangani sengketanya sesuai dengan hukum internasional. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan pengaduan terhadap klaim dan Tindakan ke Pengadilan Arbitrase Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di Deen Haag Belanda. Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan membangun pulau-pulau buatan. Filipina mengungkapkan bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan garis Sembilan putus-putus bertentangan dengan hak berdaulat wilayah Filipina dan Hukum Laut Internasional. Hak berdaulat Filipina yang dituntut yaitu untuk tidak semena-mena berlayar dan menangkap ikan di kepulauan *Scarborough Shoal*, *Sabina Shoal* dan *Second Thomas Shoal* dan harus mematuhi hukum internasional yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS (*United Nations Covention on the law of the sea*).

Kemudian, di tahun 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Deen Haag, Belanda memutuskan kemenangan Filipina atas gugatannya di Laut Cina Selatan. Hasil putusan tersebut yaitu:

1. Mahkamah arbitrase menyatakan bahwasannya klaim Tiongkok atas wilayah didalam garis sembilan putus-putus tidak memiliki dasar hukum yang sah
2. Mahkamah arbitrase menegaskan bahwa tidak ada pulau di Kepulauan *Spratly* yang memenuhi kriteria untuk memiliki *zona ekonomi eksklusif (ZEE)* atau landas kontinen sendiri, sehingga klaim Tiongkok atas ZEE sekitar pulau tersebut tidak sah
3. Mahkamah arbitrase menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina dengan menghalangi akses nelayan filipina ke daerah penangkapan ikan mereka di *sekitar Scarborough Shoal* dan melakukan kegiatan yang merusak lingkungan laut

4. Mahkamah arbitrase juga menegaskan bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya untuk menghormati hak Filipina dalam memanfaatkan Sumber daya alam di ZEE

Akan tetapi, Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di wilayah sehingga menimbulkan keributan sampai saat ini di kawasan laut cina selatan (Adi, 2020). Dengan keputusan Tiongkok tersebut, Amerika Serikat menyampaikan kekhawatirannya tentang keamanan dan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat menyuarakan agar Tiongkok menghormati hukum laut Internasional dan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya, memiliki tujuan yang signifikan terhadap perkembangan di Laut Cina Selatan, Tujuan ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan jalur perdagangan global, tetapi juga stabilitas keamanan Kawasan yang merupakan bagian dari strategi geopolitiknya. Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat jelas dalam masalah kepulauan *Spartly*. Sengketa kepemilikan kepulauan *spartly* terlihat dalam klaim tumpang tindih terhadap Sebagian atau seluruh kepulauan di wilayah ini. Di Tengah-tengah sengketa kepulauan *spratly*, Amerika menentang sikap Tiongkok yang cukup mendominasi dalam hal melontarkan tuduhan dan bahkan Tindakan-tindakan yang bersifat provokasi.

Perlu kita ketahui bahwa hubungan antara Amerika dan Filipina Serikat memiliki hubungan yang mendalam yang terbentang dari zaman kuno hingga saat ini, yang dimana hubungan ini mencakup aliansi keamanan bilateral, kerjasama militer yang luas, hubungan antar warga negara yang erat, dan kepentingan strategis ekonomi bersama. Filipina, yang terletak di sebelah Timur Laut Cina Selatan dan Selatan Taiwan, cukup lama memainkan peran penting dalam kebijakan Amerika Serikat. Filipina merupakan negara demokratis yang memiliki hubungan dengan negara lain dan ikatan liberal yang cukup kuat (Lum et al., 2022)

Amerika Serikat secara tegas menolak klaim yang diajukan oleh Tiongkok terhadap wilayah sengketa di laut cina selatan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini didasarkan pada permintaan dari negara-negara sekutu dan mitranya yang mengharapkan dukungan untuk mencegah Tiongkok menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya guna menekan negara-negara tetangganya. Sebaliknya, Amerika Serikat mendorong Filipina dalam penyelesaian konflik melalui jalur Hukum Internasional. Meskipun tidak memiliki kepentingan langsung atas perairan Laut Cina Selatan, Amerika Serikat menyatakan bahwa dukungannya aktifnya dalam konflik ini karena bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta memastikan bahwa sengketa wilayah tersebut diselesaikan dengan cara damai dan sesuai dengan hukum internasional. Sebagai negara dengan pengaruh global yang besar, termasuk di kawasan Asia, Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam jika negara lain yang berpotensi menjadi pesaingnya, terutama Tiongkok.

Dukungan Amerika Serikat Pasca PCA (*Permanent Court of Arbitration*) terhadap Filipina dalam konflik laut cina selatan dapat dilihat melalui berbagai dimensi, mulai dari dukungan diplomatik, militer, sampai komitmen terhadap penegakkan hukum internasional. Dukungan ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan Filipina, tetapi juga untuk mempertahankan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Kemudian, di Tahun 2023 konflik ini kembali memanas, yang dimana telah terjadi beberapa kali insiden di Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok dan Filipina. Tiongkok kembali agresif di wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif* Filipina yaitu di Kepulauan *Scarborough Shoal* dan *Spratly*. Di Kepulauan *Spratly* ada pulau-pulau yang dimiliki oleh Filipina yaitu *Second Thomas Shoal* dan *Scarborough Shoal*. Tiongkok kembali agresif dengan masuknya kapal-kapal Tiongkok di ZEE Filipina (Lisbet, 2023)

Berdasarkan rangkaian insiden yang terjadi di tahun 2023-2025, konflik laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina semakin menunjukkan eskalasi yang serius. Berbagai tindakan agresif, seperti penggunaan laser berkekuatan tinggi, tembakan meriam air, hingga insiden tabrakan antara kapal, mencerminkan upaya Tiongkok untuk menghalangi aktivitas Filipina di wilayah sengketa. Tindakan ini tidak hanya memperkeruh hubungan bilateral kedua negara tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih besar di kawasan. Filipina menganggap tindakan Tiongkok sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan mereka, terutama di area-area strategis seperti Sabina Shoal dan Scarborough Shoal.

Selain berperan terhadap gugatan Filipina di Mahkamah Arbitrase 2016, Amerika Serikat juga berperan dalam meningkatkan perjanjian Operasi Kebebasan Navigasi (*Freedom of Navigation Operations/FONOPs*) untuk menantang klaim Tiongkok yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum internasional. FONOPs menggunakan pengiriman kapal perang dan pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah-wilayah yang diklaim oleh Tiongkok seperti di sekitar kepulauan *Spratly*. Tujuannya untuk menegaskan ke Tiongkok bahwa perairan ini adalah wilayah internasional yang terbuka bagi navigasi semua negara. Amerika Serikat juga semakin menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Filipina dikarenakan semakin agresifnya Tiongkok di perairan wilayah milik Filipina. Upaya yang dilakukan Amerika dalam mendukung Filipina di Laut Cina Selatan dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi mencakup aspek militer, dukungan diplomatik dan penegakan hukum internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Realisme

Perspektif realisme muncul sebagai salah satu respon dari kegagalan untuk mencegah terjadinya perang dunia kedua yang dilakukan oleh perspektif liberalisme. Realisme klasik menjadi asumsi dasar dari perspektif realisme yang mengansumsikan bahwa egoistik dan agresif merupakan watak dari seorang manusia. Realisme sering disebut dengan nama *power politics*, yang dimana realisme merupakan salah satu pendekatan yang dominan dalam hubungan internasional baik dalam pemikiran akademik maupun pemikiran para pembuat keputusan. Seperti yang telah diketahui, realisme merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa dinamika politik internasional berjalan secara anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antar negara (Asrudin, 2017).

Dalam hubungan internasional, realisme politik berasal dari realitas yang ada, bukan dari idealisasi atau bagaimana seharusnya dunia berfungsi. Kaum realis berargumen bahwa dalam dunia nyata, konflik merupakan fenomena yang hampir tak terhindarkan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, sifat alami manusia yang cenderung memiliki potensi kekerasan, dan kedua, kecenderungan masyarakat global untuk membentuk negara-negara berdaulat dan independen yang sering kali enggan mengakui atau tunduk pada otoritas di luar atau di atas kedaulatan mereka sendiri. Bagi kaum realis, dinamika hubungan internasional pada dasarnya didorong oleh upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan atau dominan yang bersumber dari sifat manusia yang kompetitif dan konfliktual. Dengan demikian, realisme memandang konflik sebagai konsekuensi logis dari interaksi antarnegara dalam sistem internasional yang anarkis, di mana setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri tanpa adanya otoritas pusat yang mengatur. Hal ini telah terjadi dan menjadi pandangan sejak tahun 1648, saat perjanjian Westphalia atau perdamaian Westphalia dimana sejumlah negara Eropa berkumpul untuk mengakhiri berbagai perang (O. Christopher, 2022).

Hans Morghentau dikenal sebagai salah satu tokoh utama yang mendirikan aliran realisme dalam studi hubungan internasional pada abad ke-20. Pemikiran ini menegaskan bahwa negara bangsa aktor sentral dalam hubungan internasional, dengan fokus utama kajiannya pada kekuasaan. Morghentau menyoroti peran penting “kepentingan nasional” sebagai dasar bagi setiap negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya dalam karya berjudul *politics among nations*, ia menjelaskan bahwa realisme politik dalam studi hubungan internasional diwujudkan melalui konsep kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Hingga saat ini, kedua konsep tersebut tetap menjadi pilar utama dalam analisis hubungan internasional (Asrudin, 2017).

Realisme digunakan sebagai salah satu perspektif utama didalam teori hubungan internasional karena terdapat point-point penting, diantaranya :

1. Negara ialah sebagai peran utama
2. Ketika menjalin hubungan internasional negara akan menggunakan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan negara lain
3. Terdapat perbedaan diantar politik luar negri dan politik dalam negri karna terdapatnya pola-pola atau struktur analisis yang tidak sama diantara politik luar negeri dan politik dalam negerinya.
4. Tujuan dalam menjalin hubungan antar negara ialah berusaha untuk memperoleh kejayaan atau kekuasaan
5. Adanya pandangan pesimistis atas sifat manusia

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif adalah metode dengan menggunakan berbagai perspektif dan teknik penelitian untuk mengetahui bagaimana orang melihat dan memahami dunia sosial. Dalam metodologi kualitatif, tidak ada metode yang seragam. Metodologi ini dapat melibatkan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang bervariasi. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, yang bergantung pada data numeric, pendekatan humanistic dalam penelitian kualitatif memprioritaskan pemahaman mendalam tentang fenomenal sosial. Metodologi kualitatif menghasilkan data non-numerik melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara, dan yang memberikan wawasan tentang individu (Veluswamy et al., 2013). Dalam penelitian kualitatif sangat memperhatikan konteks di mana data dikumpulkan, sehingga hasilnya dapat relevan dan bermakna (Freitas, 1998). Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik berupa studi kepustakaan. Data tersebut dipilih dan kemudian diolah dengan bermacam literature seperti jurnal ilmiah, buku, surat kabar, kunjungan situs web internet serta sumber lain yang menunjang penelitian.

Menurut Sugiyoo, metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan serta manfaat tertentu. Dalam pelaksanaannya, penelitian ilmiah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus ada proses analisis secara induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, serta berpijak pada penalaran ilmiah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk membangun sensitivitas terhadap permasalahan yang dikaji, menjelaskan realitas berdasarkan data empiris, serta mengembangkan pemahaman mendalam terhadap satu atau lebih fenomena yang diteliti melalui teori yang dibangun dari bawah (*grounded theory*) (Han et al., 2019).

PEMBAHASAN

Peran Amerika Serikat terhadap Filipina dalam Penegakan Hukum Laut Internasional Pasca Putusan PCA

Peran pertama yang dilakukan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi pada Filipina dan Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah dengan memberi dukungan penuh atas gugatan Filipina ke Mahkamah Arbitrase UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Setelah keluarnya putusan dari *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada 12 Juli 2016, Amerika Serikat secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap Filipina dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Amerika menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum kepada para pihak yang bersengketa (Sinica et al., 2017), berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (UNCLOS). Meskipun Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi UNCLOS, negara ini secara konsisten mengakui prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut sebagai kerangka hukum internasional yang sah untuk mengatur klaim dan aktivitas di wilayah laut.

Peran Amerika Serikat terhadap Filipina dalam penegakan hukum laut internasional dilakukan melalui berbagai pernyataan diplomatik yang tegas. Pemerintah Amerika, baik melalui Departemen Luar Negeri maupun perwakilannya di berbagai forum internasional berulang kali menyuarakan keprihatinan atas tindakan Tiongkok yang dinilai tidak sejalan dengan hasil Putusan Mahkamah Arbitrase dan ketentuan UNCLOS. Amerika Serikat menggarisbawahi bahwa setiap klaim maritim harus didasarkan pada ketentuan hukum internasional, bukan pada klaim sejarah sepihak yang tidak memiliki dasar hukum, sebagaimana diklaim oleh Tiongkok dengan konsep “Sembilan garis putus-putus”/ (*Nine Dash-Line*).

Menunjukkan hubungan yang semakin erat, kunjungan Presiden Marcos ke Amerika Serikat pada September 2022 diikuti oleh perjalanan Wakil Presiden AS Kamala Harris ke Provinsi Palawan pada November di tahun yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Harris menegaskan kembali dukungan Washington terhadap Filipina dalam menegakkan hukum dan norma internasional di Laut Cina Selatan.

Selain pernyataan resmi, Amerika Serikat juga mendorong isu Laut Cina Selatan ke dalam agenda berbagai forum internasional, seperti Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan ASEAN Regional Forum. Dalam forum-forum ini, Amerika Serikat secara aktif membela posisi Filipina dengan menekankan pentingnya menghormati hasil putusan PCA dan mempertahankan tatanan berbasis hukum internasional di laut. Amerika berargumen bahwa ketaatan terhadap hukum laut internasional bukan hanya penting untuk Filipina, melainkan juga untuk stabilitas dan keamanan regional secara keseluruhan.

Untuk memperkuat posisi hukum Filipina, Amerika juga mendukung produksi dokumen-dokumen resmi yang menjelaskan interpretasi sah atas hukum laut internasional. Melalui Biro Oseanografi dan Lingkungan Internasional (*Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs*). Departemen Luar Negeri Amerika merilis laporan tentang batas-batas maritim yang sah di Laut Cina Selatan. Laporan ini mempertegas bahwa klaim maritim harus sesuai dengan ketentuan Pasal UNCLOS tentang pulau, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, serta membantah klaim-klaim Tiongkok yang tidak berdasar.

Selain itu, Amerika juga membantu memperkuat kapasitas hukum dan teknis Filipina dalam mengelola wilayah maritimnya. Ini dilakukan melalui program-program pelatihan tentang pengelolaan

batas maritim, asistensi dalam pembuatan peraturan nasional yang sejalan dengan UNCLOS, serta konsultasi hukum untuk memperkuat kemampuan Filipina dalam membawa isu pelanggaran hukum laut ke forum internasional. Bantuan ini berfokus pada peningkatan pemahaman atas prinsip ZEE, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi maritim berdasarkan hukum internasional.

Konvensi hukum laut internasional 1982 yang terdapat pada pasal 55 menjelaskan bahwa ZEE merupakan wilayah laut yang berada di luar dan berbatasan langsung dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus. Rezim ini mengatur hak-hak yurisdiksi negara pantai, serta hak dan kebebasan negara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi. Adapun batas maksimum wilayah ZEE tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut yang di ukur dari garis pangkal (Anwar, 2015). Setelah putusan PCA 2016 hingga saat ini, Amerika Serikat tetap konsisten dalam mempertahankan posisi tersebut, terlepas dari pergantian pemerintahan, mulai dari Presiden Trump hingga Presiden Biden sama-sama menyatakan bahwa keputusan PCA 2016 harus dihormati dan dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa maritim di laut cina selatan. Amerika serikat juga terus mendukung pendekatan hukum internasional sebagai satu-satunya jalan sah untuk mengelola dan menyelesaikan klaim di laut, bukan melalui penggunaan kekuatan ataupun tekanan politik

Peran Amerika Serikat terhadap filipina dalam Bidang Pertahanan Militer

Dukungan kedua Pasca Putusan PCA 2016, yang dilakukan amerika serikat iyalah dalam bidang Pertahanan Militer. Selama masa perang dingin, amerika serikat memiliki dua pangkalan militer besar di filipina, yaitu pangkalan udara Clark dan pangkalan angkatan laut Teluk Subic. Sejak Tiongkok menyatakan klaim kedaulatan yang luas atas laut cina selatan, kawasan tersebut mengalami peningkatan militerisasi upaya Tiongkok untuk mempertahankan dan memperkuat klaim tersebut. Meskipun kekhawatiran filipina semakin meningkat setelah Tiongkok mengambil alih Scarborough Shoal tahun 2012, lalu Filipina berhasil membawa serta memenangkan kasus arbitrase internasional melawan Tiongkok terkait laut cina selatan, Filipina belum memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan tersebut. Pemerintah filipina sebenarnya telah menunjukkan keinginannya untuk memperkuat kekuatan maritimnya melalui penyusunan rencana pelayaran strategis pada tahun 2020, yang menargetkan pengadaan kapal patroli lepas pantai, pesawat maritim patroli, kapal pengangkut, kapal selam serta berbagai aset lainnya. Namun, sampai saat ini kemajuan nyata dalam pelaksanaan rencana tersebut masih sangat terbatas. Padahal, menurut Kepala Angkatan Laut Filipina, Robert Empredrad, meskipun filipina pernah memiliki kekuatan laut yang dominan Pasca Perang dunia kedua, kini Angkatan Laut Filipina dianggap sebagai salah satu yang terlemah di Asia Tenggara (Grossman, 2019).

Perjanjian keamanan antara filipina dan amerika serikat tercermin melalui pelaksanaan latihan militer bersama, di mana peran pasukan amerika lebih difokuskan sebagai unit pendukung bukan pasukan tempur utama. Melalui berbagai latihan ini, kedua negara memperkuat kemampuan militer serta meningkatkan kemampuan pertahanan filipina, khususnya dalam menghadapi ancaman di kawasan laut cina selatan (Voigt, 2020). Dalam konteks ini perselisihan di perairan seperti wilayah Scarborough Shoal dan kepulauan Spratly, keterlibatan militer amerika serikat semakin diperlihatkan melalui kehadiran rutin kapal-kapal angkatan laut Amerika di sekitar wilayah tersebut. Kehadiran ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen amerika dalam menjamin kebebasan navigasi dan mendukung posisi filipina dalam agresi maritim Tiongkok. Berbagai langkah dukungan militer yang dilakukan Amerika Serikat dalam menunjukkan komitmennya dalam membantu filipina guna

memperkuat pertahanan di tengah sengketa laut cina selatan. Pada tahun 2023, Amerika Serikat dan Filipina menyelenggarakan latihan militer gabungan terbesar dalam hubungan kedua negara. Latihan tersebut dikenal sebagai Balikatan, yang dalam bahasa Tagalog berarti Bahu-membahu, dan melibatkan partisipasi lebih dari 17.600 personel militer dari kedua negara. Kegiatan ini berlangsung hingga akhir April dan mencakup berbagai simulasi militer, seperti latihan tembak-menembak serta uji coba serangan roket terhadap kapal musuh yang dilaksanakan di wilayah laut cina selatan, khususnya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Latihan ini dipandang sebagai upaya nyata kedua negara untuk meningkatkan militer dan memperkuat respon kolektif terhadap potensi ancaman regional, khususnya dalam konteks ekspansi militer dan klaim agresif Tiongkok di wilayah ZEE Filipina.

Selain pelaksanaan latihan militer bersama, Peran Amerika Serikat terhadap Filipina dalam memperkuat posisinya di laut cina selatan juga tercermin melalui dua instrumen strategis lainnya, yakni *Freedom of Navigations Operations (FONOPs)* dan perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)*.

Kedua instrumen ini tidak hanya menunjukkan komitmen Amerika Serikat dalam menjamin stabilitas dan keterbukaan jalur pelayaran internasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya kolektif untuk membendung ekspansi Tiongkok di wilayah sengketa sebagai bentuk penyeimbangan kekuatan yang digunakan Amerika Serikat di laut cina selatan:

Freedom of Navigations Operation (FONOPs)

Salah satu langkah yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Filipina dalam bidang militer di kawasan laut cina selatan, khususnya di sekitar Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly yang termasuk perairan ZEE Filipina, dilakukan melalui operasi *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)*. FONOPs merupakan Operasi Militer yang dilakukan secara sepihak oleh Angkatan Amerika Serikat. Melalui operasi ini, kapal-kapal perang angkatan laut Amerika Serikat secara rutin berlayar di sekitar wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) tersebut, tujuannya untuk menentang klaim maritim sepihak Tiongkok dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi berdasarkan hukum laut internasional. Tujuan dari pelaksanaan FONOPs oleh Amerika Serikat di laut cina selatan adalah untuk menegaskan prinsip kebebasan navigasi terhadap klaim yurisdiksi maritim yang dianggap berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan laut lepas. Sebagaimana sudah tercantum dalam konvensi Hukum laut internasional (UNCLOS). Melalui FONOPs, Amerika Serikat menggunakan kapal-kapal militernya sebagai bentuk tindakan operasional untuk mendukung deklarasi kebijakan mengenai kebebasan navigasi (Berkofsky, 2017).

Pasca Putusan PCA 2016, Amerika Serikat secara konsisten melaksanakan FONOPs, pada 24 Mei 2017, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke milik Amerika Serikat berlayar dalam jarak sekitar enam mil laut dari Scarborough Shoal. Dalam pelayaran tersebut, Amerika Serikat beroperasi secara normal tanpa mengikuti ketentuan lintas damai. Kapal ini berada di wilayah selama kurang lebih 90 menit dan bahkan sempat melakukan latihan di atas kapal. Operasi ini secara langsung menentang klaim Tiongkok atas keberadaan laut teritorial di sekitar Scarborough Shoal, sebuah fitur yang tergolong di Kepulauan Spratly. Lalu pada 27 Mei 2022, kapal penjelajah berpeluru kendali kelas milik Amerika Serikat, bersama kapal perusak berpeluru kendali kelas berlayar dalam jarak 12 mil laut dari gugusan Kepulauan Paracel. Secara khusus kedua kapal tersebut melakukan manuver disekitar tiga pulau. Operasi ini secara langsung menentang klaim Tiongkok atas batas laut teritorial sejauh 12 mil laut berdasarkan garis daris lurus di sekitar Scarborough Shoal (Cho, 2020)

Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Langkah kedua yaitu melalui EDCA. EDCA merupakan perjanjian pertahanan yang ditingkatkan antara Amerika Serikat dan Filipina. Tujuannya untuk memperkuat kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di Filipina melalui sistem rotasi strategis. Perjanjian militer ini memungkinkan pasukan Amerika yang ditempatkan di Asia Timur untuk mengakses fasilitas militer Filipina secara luas. EDCA disusun sebagai bentuk penyeimbang kekuatan terhadap Tiongkok, yang kala itu memperluas klaim maritimnya di Laut Cina Selatan, termasuk melalui ketegangan dengan Filipina di sekitar Scarborough Shoal pada tahun 2012 sampai saat ini. Di bawah perjanjian EDCA, Amerika Serikat dan Filipina dapat melaksanakan latihan kerja sama keamanan yang berskala besar dan bernilai strategis, serta pelatihan gabungan yang memperkuat dan peningkatan kapasitas.

Pasca Putusan PCA 2016 yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas wilayah laut Cina Selatan melalui *Nine Dash-Line* tidak memiliki dasar hukum internasional. Amerika Serikat mulai lebih aktif menjalankan implementasi EDCA sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di kawasan tersebut, terutama di wilayah ZEE Filipina yang mencakup sekitar Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly. Melalui EDCA Amerika Serikat tidak hanya menempatkan pasukan rotasional, tetapi juga membangun infrastruktur militer seperti fasilitas penyimpanan logistik, landasan udara dan pusat pemantauan di beberapa lokasi strategis, termasuk di pulau Uzon bagian utara dan pelawan yang lokasinya dekat dengan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama, patroli bersama maritim, dan memberikan bantuan teknologi serta intelijen kepada angkatan laut dan penjaga pantai. Tujuannya bukan hanya untuk memperkuat posisi pertahanan Filipina sebagai sekutu, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik terhadap aktivitas provokatif Tiongkok seperti patroli kapal milisi maritim, pembangunan pulau buatan dan pengusiran kapal nelayan Filipina.

Dukungan Diplomatik

Amerika Serikat sebelumnya mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam merespons konflik antara Tiongkok dan Filipina di Laut Cina Selatan, seperti yang terlihat pada insiden Kepulauan Spratly tahun 1995 dan Scarborough Shoal tahun 2012. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo Amerika Serikat memperjelas Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina dengan menyatakan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap kapal, pesawat, atau personel militer Filipina di Laut Cina Selatan akan memicu kewajiban pertahanan berdasarkan perjanjian tersebut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden terus menegaskan kembali komitmen tersebut melalui berbagai pernyataan resmi. Meskipun istilah “serangan bersenjata” belum dijelaskan secara rinci oleh kedua negara, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan dalam Shangri-La Dialogue pada Juni 2024 bahwa kematian warga negara Filipina dalam insiden maritim akan dianggap cukup untuk mengaktifkan perjanjian tersebut pernyataan yang juga dikuatkan oleh Komando Indo Pasifik AS.

Menunjukkan hubungan yang semakin erat, kunjungan Presiden Marcos ke Amerika Serikat pada September 2022 diikuti oleh perjalanan Wakil Presiden AS Kamala Harris ke Provinsi Palawan pada November di tahun yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Harris menegaskan kembali dukungan Washington terhadap Filipina dalam menegakkan hukum dan norma internasional di Laut Cina Selatan.

Sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan dan bentrokan di kawasan, AS secara konsisten mengeluarkan pernyataan keras yang mengancam tindakan Beijing dan mendeklarasikan dukungan penuh terhadap Filipina. Pernyataan ini muncul setelah berbagai insiden, seperti serangan

laser pada Februari 2023 serta penggunaan meriam air oleh Tiongkok pada Agustus 2023 dan Maret 2024.

Pada Maret 2024, Duta Besar AS untuk Tiongkok secara tegas menyatakan bahwa Scarborough Shoal adalah wilayah kedaulatan Filipina pernyataan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai sikap AS terhadap sengketa kedaulatan. Menyusul insiden serius di bulan Juni 2024, Departemen Luar Negeri AS mengecam keras tindakan Tiongkok yang dianggap membahayakan keselamatan personel militer Filipina, tidak bertanggung jawab, dan mengancam stabilitas kawasan. Insiden lainnya, termasuk tabrakan di sekitar Sabina Shoal, juga mendapat kecaman tegas dari Washington.

Sepanjang berbagai kejadian tersebut, benang merah dalam sikap Amerika Serikat adalah dukungan terhadap putusan arbitrase internasional tahun 2016, penghormatan terhadap UNCLOS 1982, serta penegasan bahwa serangan terhadap aset publik Filipina di Laut Cina Selatan tercakup dalam Perjanjian Pertahanan Bersama 1951. AS juga terus menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional tersebut.

Setelah kunjungan marcos ke amerika serikat pada september 2022, wakil presiden kamala haris mengunjungi palawan dan menegaskan dukungan amerika serikat terhadap filipina dalam mempertahankan hukum internasional di laut cina selatan. Sejak saat itu, amerika serikat semakin memperhatikan tindakan agresif Tiongkok termasuk serangan laser, penggunaan meriam air, Tabrakan kapal. Amerika serikat mengutuk tindakan tiongkok, menyebutnya membahayakan nyawa, melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas regional.

Pasca keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang menolak klaim historis Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok secara terbuka menolaknya dan menyatakan akan tetap melanjutkan kebijakan lautnya. Situasi ini kemudian menjadi sorotan, terutama mengenai bagaimana ASEAN akan merespons tantangan tersebut. Sengketa Laut Cina Selatan menjadi ujian penting bagi persatuan ASEAN dan kemampuannya menjaga peran sentral dalam dinamika kawasan. Keputusan PCA meningkatkan tekanan terhadap ASEAN, khususnya terkait kemampuannya menghasilkan pernyataan bersama pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-49 di Laos, yang sekaligus menjadi indikator arah sikap ASEAN.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam membantu filipina untuk mempertahankan hak-hak wilayah perairan yang menjadi miliknya yang diganggu oleh Tiongkok melalui upaya Peran yang mencakup Penegakkan Hukum Laut Internasional, Peran militer, Peran Diplomatik dalam forum internasional. Konflik laut cina selatan tidak hanya sebuah tindakan yang merugikan dua pihak, tetapi juga dapat merugikan banyak pihak yang terlibat didalamnya. Maka dengan hal itu, dukungan amerika serikat terhadap filipina tidak hanya berfokus pada tindakan militer, tetapi juga bertindak dalam mendampingi filipina untuk membawa ke jalur hukum yang sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, lalu mendukung filipina melalui dukungan diplomatik, dalam membawa ke forum internasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan amerika serikat mencerminkan pendekatan strategi indo-pasifik yang multidimensi dalam memperjuangkan hak-hak wilayah perairan filipina.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya keseluruhan Peran pasca putusan PCA yang dilakukan oleh Amerika serikat terhadap filipina dalam sengketa laut cina selatan menunjukkan hasil yang beragam dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan

bahwa peran negara yang berkapasitas tinggi sangat berpengaruh dalam proses perebutan wilayah sengketa. Amerika Serikat juga berhasil mengajak berbagai organisasi untuk bersama-sama melawan Tiongkok yang semakin agresif dan semena-mena di laut Cina selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrudin, A. (2017). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28830>
- Berkofsky, A. (2017). US freedom of navigation operations (FONOPs) in the South China sea-able to keep Chinese territorial expansionism in check? In *US Foreign Policy in a Challenging World: Building Order on Shifting Foundations*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54118-1_17
- Cho, M. (2020). *The U . S . Freedom of Navigation Operations in the South China Sea and the Strategic Importance of the Maritime Features* 남중국해에서의 미국의 항행의 자유 작전과 Graduate School of International Studies.
- Delanova, M. O., & Mochamad Yani, Y. (2022). Dampak Kebijakan Amerika Serikat Di Indo-Pasifik Dalam Menghadapi China Terhadap Keamanan Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 79-97. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.413>
- Grossman, B. D. (2019). *Military Build Up in the South China Sea* □. December 2019, 1-28.
- Han, W. P., Erviriani, E., Siregar, A. R. A., Ivone, I., & Lisa, L. (2019). Analisis Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Karyawan di Sekolah EN Mandarin – Medan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(2), 1-6.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579-591. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>
- Kompas. (2012). "Filipina dan China Saling Tuduh soal Laut Cina Selatan." Kompas Internasional. https://travel.kompas.com/read/2012/04/17/18253935/filipina.dan.china.saling.tuduh.soal.laut.cina.selatan?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Lisbet. (2023). Ketegangan Filipina Dan China Di Laut China Selatan Serta Upaya Asean Dalam Mengatasinya. *Info Singkat*, XV(24), 7-10.
- Lum, T., Dolven, B., & Arabia, C. L. (2022). The Philippines: Background and U.S. Relations. *Congressional Research Service: Incoming the Legislative Debate since 1914*. <https://sgp.fas.org/crs/row/R47055.pdf>
- Sinica, A., Taiwan, T., Asian, E., Program, P., & Tønnesson, S. (2017). *The Impact of the Law of the Sea Convention on Conflict and Conflict Management in the South China Sea* Yann-Huei Song Institute of European and American Studies.
- Usiemure O. Christopher. (2022). (Pdf) Realist Theory of International Relations. *ResearchGate*, May. https://www.researchgate.net/publication/360558884_REALIST_THEORY_OF_INTERNA_TIONAL_RELATIONS

- Voigt, M. R. (2020). Republic of the Philippines and U. S. Relations. *Republic of the Philippines and U. S. Relations*, 1-93.
- Wahyu Setyo Adi, D. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 39-51. <https://jhlg.rewangrencang.com/>